

## A B S T R A K

### PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN GOLONGAN TIMUR ASING TIONGHOA MELALUI SURAT KABAR MENURUT HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh :

**MARAH HALIM**

NIM : 98.840.0021

Jurusan : Hukum Keperdataan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah salah satu pemutusan hubungan perkawinan. Untuk sahnya perceraian, maka perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan yang seterusnya dibuktikan dengan adanya suatu akte perceraian.

Pernmasalahan yang timbul adalah apakah alasan pelaksanaan perceraian melalui surat kabar yang kebanyakan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Golongan Timur Asing Tionghoa dan bagaimanakah keabsahan dan kekuatan hukum perceraian tersebut.

Hipotesa yang dikemukakan adalah pelaksanaan pemutusan hubungan perkawinan dilaksanakan dengan alasan hal tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat Golongan Timur Asing Tionghoa, dimana pelaksanaan perceraian melalui surat kabar adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan pihak yang pernah melakukan perceraian melalui pengumuman di surat kabar.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah alasan dan penyebab pelaksanaan perceraian melalui surat kabar adalah disebabkan hal itu sebagai adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Golongan Timur Asing Tionghoa, dimana pelaksanaan perceraian melalui surat kabar adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab menurut Pasal 207 KUH Perdata jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perceraian hanya sah melalui putusan Pengadilan yang dibuktikan dengan akte perceraian.